

Determinan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil

Anggi Anggreini

Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl Srijaya Negara Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan
Anggianggreini72@gmail.com

Bainil Yulina

Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl Srijaya Negara Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan
byulina@gmail.com

Nurhasanah

Program Studi Akuntansi Sektor Publik, Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Sriwijaya
Jl Srijaya Negara Bukit Besar, Palembang, Sumatera Selatan
nurhasanahrizkiramadhan@gmail.com

Article's History:

Received 10 June 2024; Received in revised form 28 June 2024; Accepted 3 July 2024; Published 1 August 2024. All rights reserved to the Lembaga Otonom Lembaga Informasi dan Riset Indonesia (KITA INFO dan RISET).

Suggested Citation:

Anggreini, A., Yulina, B., & Nurhasanah. (2024). Determinan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran pada Kabupaten/Kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi). JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi), 10 (4). 2619-2629. <https://doi.org/10.35870/jemsi.v10i4.2806>

Abstrak:

Penelitian ini ditujukan dalam mengukur pengaruh pendapatan asli daerah (PAD), dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil (DBH) terhadap sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) di tahun 2018-2022. Populasi penelitian ialah 7 kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung. Penelitian ini menerapkan metode sampling jenuh. Data yang digunakan data sekunder yang bersumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Teknik yang diterapkan ialah analisis regresi linear berganda dengan pengujian data memanfaatkan *software IBM SPSS* Versi 29. Secara parsial, penelitian membuktikan bahwa PAD dan DBH memengaruhi SILPA. DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap SILPA. Secara simultan, hasil menunjukkan PAD, DAU, DAK, dan DBH mempengaruhi SILPA.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

JEL Classification: M40,M41

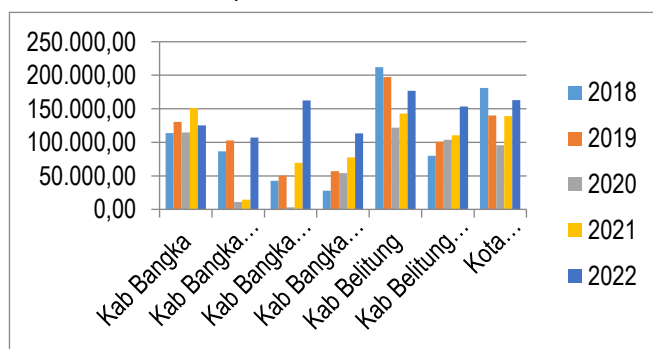
PENDAHULUAN

Masa reformasi Indonesia menetapkan desentralisasi untuk mengorganisir pemerintah melalui pelaksanaan otonomi daerah. Kebijakan tonomi timbul demi menjawab harapan daerah yang ingin turut berkontribusi dalam menyokong pembangunan dan pelayanan public. Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, menjelaskan penyelenggarakan keuangan daerah butuh diorganisir dengan terstruktur, efektif, efisien, transparan, ekonomis, disiplin terhadap peraturan, dan dipertanggungjawabkan dengan mengacu asas keadilan, ketaatan dan keuntungan bagi masyarakat. Sehingga dibentuklah kegiatan laporan keuangan daerah yang mewajibkan pemerintah daerah menyampaikan usaha dan hasil yang tercapai. Setiap akhir periode anggaran,

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebagai bukti ketepatan pengelolaan keuangan publik. Salah satu bentuk LKPD adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA). LRA menginformasikan perbandingan realisasi pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang memberikan profit anggaran dan minus anggaran. Jika adanya perbedaan baik dalam selisih di pendapatan, pengeluaran serta pembiayaan maka terjadinya Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran disingkat SILPA/SIKPA.

Menurut PP mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah Nomor 12 Tahun 2019, periode SILPA atau selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran adalah satu tahun. keberadaan SILPA masih menjadi masalah umum bagi pengelola keuangan daerah, sebab menentukan kondisi positif maupun negatif. Adanya surplus APBD dan pembiayaan neto positif, maka SILPA positif. Namun jika SILPA yang negatif tidak terjadinya indikasi efektivitas dan efisiensi anggaran daerah tersebut. Hal ini dikarenakan strategi dan aktivitas didesain tidak optimal pelaksanaannya. Sehingga dapat menimbulkan lemahnya dalam pelaksanaan anggaran dan tidak tercapainya pelayanan serta pembangunan untuk kepentingan publik.

Berdasarkan data yang diperoleh dari website BPK dari Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat perkembangan Silpa selama tahun 2018-2022 pada Gambar 1



Sumber: Website BPK RI Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

Gambar 1
Gambar SILPA pada kab/kota Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022

Berdasarkan data pada gambar 1 menunjukkan SILPA tertinggi selama lima tahun berturut-turut di peroleh Kabupaten Belitung dengan nominal tertinggi di tahun 2018 berjumlah Rp 212.158 Miliar, tahun 2019 berjumlah Rp 197.095 Miliar, tahun 2020 sebesar Rp 122.084 Miliar, tahun 2021 sebesar Rp 143.007 Miliar dan tahun 2022 sebesar Rp 176.664 Miliar pada tahun tersebut. Dilihat dari tahun berjalannya diseluruh kabupaten/kota SILPA tertinggi terjadi di tahun 2022 dengan secara keseluruhan Provinsi Bangka Belitung memiliki SILPA sebesar Rp 1.001.139 Triliun. Kabupaten Bangka selatan menunjukkan SILPA terendah di kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2018 sebesar Rp 42.584 juta, 2019 berjumlah Rp 50.225 juta, 2020 berjumlah Rp 2.931 juta, 2021 berjumlah Rp 69.512 juta dan 2022 dengan nominal Rp 162.302 juta pada tahun tersebut. Hal ini terlihat bahwa SILPA pada kabupaten/kota Kepulauan Bangka Belitung meningkat dan menurun setiap tahunnya dan tidak ada satupun daerah masing-masing mencapai angka SILPA nya sebesar nol bahkan terjadinya peningkatan.

Perkembangan dari SILPA pemerintah kabupaten/kota Bangka Belitung mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga 2022. adanya peningkatan signifikan dari SILPA setiap periode, namun mengalami penurunan pada tahun 2020. Dari grafik tersebut menunjukkan keadaan kurang idealnya pada penataam keuangan daerah walaupun rata-rata kabupaten dan kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sudah mengupayakan untuk mengelola keuangan secara optimal. Hal ini dikarenakan adanya pelampauan dari sisi pendapatan daerah dan lambatnya merealisasikan program dari Pemda yang sudah dibuat. Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian mengatakan bahwa "secara keseluruhan setiap kepala daerah itu harus secara cerdas melihat kondisi eksisting terhadap APBD. APBD yang saat ini itu betul-betul untuk tidak terjadi SILPA (Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran) yang terlalu tinggi"(portal.beltim.go.id). pertumbuhan SILPA bisa digunakan untuk menilai kinerja anggaran. semakin bagus kinerja anggaran tersebut maka semakin optimalnya penyerapan anggaran tersebut dan terlaksana program yang sudah dibuat sehingga efisiensi dan efektifitas dalam mengeolah keuangan tersebut.

Faktor yang menyebutkan bahwa SILPA muncul pada komponen LRA seperti pada penelitian dahulu menyebutkan (Dulahi, 2016) peningkatan SILPA dari periode ke periode dilatarbelakangi ketidaktepatan asumsi penerimaan yang timbul dari dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK)

dan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan atau tanpa pajak tidak bisa dipastikan nominalnya. Dari hasil kajian fiskal 2017 penataan anggaran, SILPA pada pendapatan terbentuk atas aktualisasi PAD senantiasa melampaui sasaran APBD-P, yaitu 101-117%. Beberapa penelitian terdahulu telah membahas mengenai hubungan pendapatan terhadap SILPA. Penelitian yang dilakukan oleh (Dulahi, 2016) menyatakan SILPA memperoleh dampak positif dari DAU dengan signifikan. Sedangkan (Agustiani, 2020) menyatakan bahwa DAK memberikan dampak positif pada SILPA, namun tidak signifikan. Sedangkan, kondisi berbalik dengan kajian oleh (Nur, 2018) menyampaikan DBH tidak berdampak positif terhadap SILPA. Berdasarkan latar belakang yang sudah teruraikan, penulis tergerak membahas pengaruh yang diterima SILPA dari PAD, DAU, DAK, dan DBH di Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2018-2022.

TINJAUAN PUSTAKA

Stewardship Theory

Grand Theory yang dilandasi dalam penelitian ialah *Stewardship Theory*. Dalam pandangan Davis (1991), *stewardship* merupakan saat tujuan pribadi tidak mendorong manajemen, melainkan fokus mereka adalah mencapai tujuan utama mereka untuk kepentingan organisasi. Pada penelitian, yang berperan *stewardship* ialah pemerintah daerah sebagai pengelola sumber daya, sedangkan *principal* adalah rakyat sebagai pemilik sumber daya.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan rancangan keuangan tahunan daerah yang diulas dan disepakati pemerintah daerah dan DPRD, serta ditentukan melalui Perda. Struktur APBD pada Permendagri No. 21 Tahun 2011, yaitu:

1. Anggaran Pendapatan, pendapatannya berupa seluruh penerimaan uang menggunakan rekening kas umum daerah, yang meningkatkan ekuitas keuangan, ialah kebijakan daerah selama satu periode dan tidak harus dibayar lagi oleh daerah, pendapatan daerah seperti Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, serta pendapatan lain yang sah.
2. Anggaran Belanja, secara langsung anggaran ini berkaitan pada penyelenggaraan strategi dan aktivitas belanja langsung dan tidak langsung
3. Anggaran Pembiayaan, diluncurkan guna menganggarkan penerimaan-penerimaan yang harus dibayar lagi, meliputi: pengeluaran dan penerimaan pembiayaan

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut UU tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah Nomor 1 tahun 2022, Pendapatan yang bersumber dan diambil daerah itu sendiri, sejalan dengan ketetapan perundang-undangan dikenal dengan PAD. Sumber PAD dikategorikan menjadi 4 (empat) kelompok, yaitu: Restribusi, Pajak Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan beberapa Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Dana Alokasi Umum (DAU)

Berdasarkan UU tentang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, "DAU merupakan dana dari pendapatan APBN yang diarahkan untuk penyeimbangan potensi keuangan tiap daerah guna memenuhi kebutuhan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi". UU Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Keuangan Daerah menyebutkan DAU yang berasal dari Pendapatan Asli Negara (PAN) dialokasikan dengan maksud perimbangan keuangan pusat dan daerah guna membiayakan pelaksanaan desentralisasi. Sejalan dengan UU No.33 tahun 2003 tentang perimbangan dana pusat dan daerah nominal DAU setidaknya 26% dari Netto PDN (pendapatan dalam negeri) yang ditentukan APBN. Sedangkan, rasio DAU untuk provinsi dan Kabupaten/Kota selaras pada kewenangan dan kebutuhan provinsi dan Kabupaten/kota DAU diformulasikan dengan pendekatan celah fiskal (fiskal gap). Alokasi DAU untuk daerah berkemampuan fiskalnya besar, namun keperluan fiskal kecil mendapatkan DAU cenderung sedikit. Apabila keperluan lebih besar, maka daerah mendapatkan alokasi DAU cenderung banyak.

Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut UU Tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya Nomor 23 Tahun 2014, DAK adalah biaya yang berasal dari Pendapatan APBN yang diarahkan ke daerah guna mendukung pendanaan acara khusus terkait pemerintahan yang mengatur daerah. UU No.32 Tahun 2004 menyatakan DAK pada APBN hanya dialokasikan untuk daerah tertentu dalam rangka desentralisasi guna membiayakan acara tertentu yang ditetapkan

pusat dengan dasar kepentingan nasional dan membiayakan acara khusus lainnya sesuai usulan daerah. Keperluan tertentu bisa dibayarkan dengan DAK berupa keperluan yang tidak dapat dipertimbangkan dengan umum melalui rumus DAU, dan kebutuhan berupa kepentingan nasional.

Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut (Halim & Iqbal, 2012), menyatakan DBH sebagai dana yang asalnya dari pendapatan APBN yang diarahkan kepada daerah guna membiayai keperluan daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi. Pemerintah pusat memberikan DBH ke pemerintah daerah dalam dua bentuk, yaitu:

1. Dana Bagi Hasil Pajak
DBH pajak adalah bagian daerah yang sumbernya dari pemerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, Pajak bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 Wajib Pajak Orang pribadi Dalam Negeri, serta Pasal 21.
2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)
Dana yang bersumber dari pendapatan SDA yang dialokasikan kepada daerah penghasil dan daerah sekitar. Penerimaan dana bagi hasil sumber daya alam bersumber dari: Kehutanan, Pertambangan Umum, Pertambangan Minyak Bumi, Pertambangan Gas Bumi dan Pertambangan Panas Bumi.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)

Berdasarkan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 71 Tahun 2010, "SILPA adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran dalam sebuah periode". SILPA digunakan untuk membiayai penyelenggaraan agenda lanjutan dari beban belanja langsung yang mencakup belanja modal, jasa dan barang, serta pegawai.

METODELOGI

Penelitian menggunakan metode kuantitatif. Jenis data sekunder dan metode pengumpulan data dokumentasi digunakan pada penelitian ini. Data didapatkan melalui akses *website* BPK RI, berkas hasil pengecekan BPK di tahun 2018-2028. Dengan populasi penelitian, yaitu 7 Kabupaten/Kota di Kepulauan Bangka Belitung. Untuk menentukan sampel, penulis menggunakan teknik sampling jenuh. Ketentuan pengumpulan sampel yang dipakai berupa kabupaten/kota di Kepulauan Bangka Belitung yang Laporan APBD telah diaudit BPK dengan data time series selama periode 2018-2022. Variabel independen, mencakup PAD, DAU, DAK, dan DBH. Dan variabel dependen, yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah kegiatan peneliti mengelola data yang diambil, termasuk pengujiannya. Peneliti memilih teknik regresi berganda, sebelum dianalisis akan dilaksanakan penentuan model data panel dan uji asumsi klasik berbantuan SPSS versi 29. Teknik analisis data untuk penelitian, mencakup analisis statistik deskriptif, dalam uji asumsi klasik mencakup uji normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas dan autokorelasi. Selanjutnya teknik analisis regresi linear berganda, uji hipotesis mencakup uji koefisien determinan, signifikansi parsial (uji t), dan signifikansi simultan (uji f). Adapun model regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y	: SILPA
X ₁	: PAD
X ₂	: DAU
X ₃	: DAK
X ₄	: DBH
a	: Konstanta
b ₁ b ₂ b ₃ b ₄	: Koefisien Regresi
e	: Error Term (taraf kesalahan penduga penelitian)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan dengan penggunaan Kolmogorov-Smirnov (K-S) dengan nilai signifikansi sebesar 5%. Data yang terdistribusi dengan mengambil keputusan Kolmogorov-Smirnov Test (K-S) dengan signifikansi (Sig.) > 0,05. Berikut hasil ujinya.

Tabel 1
Hasil Uji Normalitas
One Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		35
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000004
	Std. Deviation	29265517656.97 429000
Most Extreme Differences	Absolute	.126
	Positive	.126
	Negative	-.058
Test Statistic		.126
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		.176
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^d	Sig.	.171
	99% Confidence Interval	Lower Bound .161
		Upper Bound .181

Sumber: Data diolah dengan SPSS Versi 29 (2024)

Dari hasil uji One Sample Kolmogorov-Smirnov Test menyatakan nilai K-S sebesar 0,176 dengan jumlah data (N) 35. Sehingga menandakan bahwa nilai residual tersalurkan normal dan memenuhi asumsi klasik.

Hasil Uji Multikolineritas

Nilai *cutoff* model regresi yang biasa digunakan dalam menyatakan terdapat multikolineritas yaitu sama dengan nilai *tolerance* ≤ 0.10 atau nilai VIF ≥ 10 . Di bawah ini ditampilkan Tabel 2 yang merupakan hasil uji multikolineritas.

Tabel 2
Hasil Uji Multikolineritas

		Coefficients ^a	
		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	PAD	.843	1,186
	DAU	.725	1,379
	DAK	.619	1,614
	DBH	.712	1,405

a. Dependent Variable: SILPA

Sumber: Data diolah dengan SPSS Versi 29 (2024)

Dapat dilihat dari setiap variabel, menunjukkan nilai tolerance melampaui 0,10 dan nilai VIF di bawah 10. Dapat dikatakan dalam penelitian tidak terjadi adanya multikolineritas.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah kondisi Ketika sebuah model regresi mengalami ketimpangan varians dari residu suatu observasi pada observasi yang lain. Penelitian ini memanfaatkan metode uji glejser yang dimana model ini terjadi jika hasil koefisien korelasi nya kurang dari 0,05 jadi model regresi tersebut mengalami heteroskedastisitas. Berikut hasil pengujian dengan metode uji glejser.

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	-2587923638,500	43151791414,112		-,060
	PAD	-,009	,071	-,025	-,132
	DAU	,005	,108	,009	,042
	DAK	,158	,133	,263	1,194
	DBH	,027	,074	,075	,363

Sumber: Data diolah SPSS Versi 29 (2024)

Pada tabel 4 menunjukkan hasil Uji Heteroskedastisitas, yang dimana setiap variabel tersebut menghasilkan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Sehingga diperoleh bahwa model regresi ini terbebas dari uji heteroskedastisitas.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi ditujukan untuk melihat hubungan kesalahan pengganggu periode t dengan periode t-1. Observasi yang runtut selama waktu yang terkait satu sama lain memunculkan autokorelasi. Penelitian menggunakan uji *Durbin-Watson* (D-W). model regresi dinyatakan bagus saat terlepas autokorelasi.

Tabel 4
Hasil Uji Autokorelasi Durbin-Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.834 ^a	.696	.655	31155522681.564	1.847

a. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAU, DAK

b. Dependent Variable: SILPA

Sumber: Data diolah dengan SPSS Versi 29 (2024)

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa Durbin-Watson sebesar 1,847. untuk menentukan gejala autokorelasi atau tidak dilihat pada nilai DU sebesar 1,7259, yang dimana sampel penelitian ini sebesar 35 dan jumlah variabel bebas sebanyak 4 variabel. Sehingga dapat disimpulkan pada hasil D-W pada penelitian ini tidak mengalami dan terbebas dari autokorelasi karena nilai $DU < DW < 4 - DU$ atau $1,7259 < 1,847 < 2,741$.

Hasil Analisis regersi linear berganda

Untuk memenuhi dalam regresi linier berganda harus memenuhi hasil uji asumsi klasik. Berikut ini dipaparkan hasil regersi linear berganda dengan memanfaatkan *software* SPSS Versi 29.

Tabel 5
Hasil Regresi Linier Berganda

Coefficients^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25974672941,177	72293180172,952		,359	,722
	PAD	,857	,119	,792	7,220	<,001
	DAU	-,107	,182	-,070	-,589	,560
	DAK	-,015	,222	-,009	-,069	,945
	DBH	,275	,123	,266	2,227	,034

a. Dependent Variable: SILPA

Sumber: Data diolah dengan SPSS Versi 29 (2024)

Hasil regresi linier berganda terlihat pada kolom *Unstandardized Coefficients* di bagian B dengan nilai masing-masing variabel yaitu, nilai PAD sebesar 0,857, nilai DAU sebesar -0,107, nilai DAK sebesar -0,15 dan nilai DBH sebesar 0,275. Sehingga dibentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

$$Y = 25974672941,177 + 0,857 X_1 - 0,107X_2 - 0,015X_3 + 0,275X_4 + e$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Koefisien Determinasi dimanfaatkan untuk menaksir sejauh mana potensi model dalam variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Berikut ini hasilnya.

Tabel 6
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.834 ^a	.696	.655	31155522681.564	1.847

a. Predictors: (Constant), DBH, PAD, DAU, DAK

b. Dependent Variable: SILPA

Sumber: Data Diolah SPSS Versi 29 (2024)

Hasil koefisien determinasi dapat diketahui pada tabel 4.16 bahwa hasil nilai koefisien determinasi (*R Square*) sebesar 0,696. Hasil output tersebut digunakan untuk menunjukkan presentase kontribusi efek dari variabel independen kepada variabel dependen dalam model regresi. Ini berarti variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK, dan DBH berkontribusi sebesar 69,6 % didalam variabel dependen yaitu Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Sisanya, sekitar 34,5% didampaki oleh variabel lainnya di luar model.

Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui variabel independent berpengaruh secara signifikan atau tidak secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil uji parsial dapat dilihat pada tabel 7 dibawah ini:

Tabel 7
Hasil Uji t

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	25974672941,177	72293180172,952		,359	,722
	PAD	,857	,119	,792	7,220	<,001
	DAU	-,107	,182	-,070	-,589	,560
	DAK	-,015	,222	-,009	-,069	,945
	DBH	,275	,123	,266	2,227	,034

a. Dependent Variable: SILPA

Sumber: Data Diolah SPSS Versi 29 (2024)

Berdasarkan tabel 7 dalam menentukan nilai t tabel dapat menggunakan persamaan pada rumus excel yaitu TINV dengan nilai probabilitnya 0,05 dan nilai df = n-k-1 atau 35-4-1 =30. Hasil diambil untuk t tabel sebesar 2,0422. Hasil uji parsial (uji t) dapat dilihat sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (X1)
Pengaruh Pendapatan Asli Daerah mempunyai t hitung sebesar 7,220 dan nilai signifikansi sebesar 0,001 atau < 0,001. Artinya t hitung 7,220 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,0422 (7,220 > 2,0422) dan nilai signifikansi yaitu 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya dapat disimpulkan Pendapatan Asli mempengaruhi SILPA dengan signifikan.
2. Dana Alokasi Umum (X2)
Pengaruh DAU memiliki t hitung sebesar -0,589 dan nilai signifikansi sebesar 0,560. Artinya t hitung - 0,589 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,0422 (- 0,589 < 2,0422) dan nilai signifikansi yaitu 0,560 lebih besar dari 0,05 (0,560 > 0,05), maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya dapat disimpulkan Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap SILPA.
3. Dana Alokasi Khusus (X3)
Pengaruh DAK memiliki t hitung sebesar -0,069 dan nilai signifikansi sebesar 0,945. Artinya t hitung - 0,069 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,0422 (-0,069 < 2,0422) dan nilai signifikansi yaitu 0,945 lebih besar dari 0,05 (0,945 > 0,05), maka H0 diterima dan Ha ditolak. Artinya dapat disimpulkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap SILPA.
4. Dana Bagi Hasil (X4)
Pengaruh Dana Bagi Hasil memiliki t hitung sebesar 2,227 dan nilai signifikansi sebesar 0,034. Artinya t hitung 2,227 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,042 (2,227 > 2,0422) dan nilai signifikansi yaitu 0,034 lebih kecil dari 0,05 (0,034 < 0,05), maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya dapat disimpulkan Dana Bagi Hasil mempengaruhi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dengan signifikan.

Hasil Uji F

Hasil pengujian F atau simultan dapat dilihat di tabel 8

Tabel 8
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	66594833398500166 000000,000	4	1664870834962504 1000000,000	17,152	<,001 ^b
	Residual	29119997806842930 000000,000	30	9706665935614311 00000,000		
	Total	95714831205343100 000000,000	34			

Sumber: Data Diolah SPSS Versi 29 (2024)

Berdasarkan tabel 8 dalam menentukan nilai F tabel dapat menggunakan persamaan pada rumus excel yaitu INV dengan nilai probabilitasnya 0,05, nilai df_1 = jumlah variabel - 1 atau $5 - 1 = 4$ dan nilai $df_2 = n - k - 1$ atau $35 - 4 - 1 = 30$. Hasil untuk F tabel sebesar 2,689. Hasil F hitung menunjukkan angka yang lebih besar daripada F tabel atau $17,152 > 2,689$ maka H_0 diterima dan nilai signifikansi lebih kecil dibandingkan 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$ maka H_0 diterima. Sehingga diperoleh PAD, DAU, DAK, dan DBH dengan serentak mempengaruhi signifikansi SILPA.

Pembahasan

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian, variabel PAD pada nilai t hitung di angka 7,220. Nilai t hitung 7,220 melampaui nilai t tabel yaitu 2,0422 ($7,220 > 2,0422$) dengan nilai signifikansi yaitu 0,000 kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$). Artinya hipotesis pertama (H_1) diterima yang berarti PAD mempengaruhi SILPA dengan signifikan. PAD adalah pendapatan yang asalnya dari daerah sendiri, yang diambil sesuai ketentuan perundangan peraturan dalam sebagai perwujudan asas desentralisasi. Pada Kabupaten/Kota Kepulauan Bangka Belitung dari sisi pendapatan setiap tahunnya meningkat dan melebihi target yang sudah dianggarkan baik berkisar 101%-110%. Hal ini menunjukkan bahwa dinilai baik pada pembangunan daerah tersebut. Tetapi, menurut (Rahmawati & Putri, 2023) terdapat ikatan positif peningkatan penerimaan daerah dengan SILPA harusnya antisipatif. Karena perencanaan target PAD yang tidak tepat mengakibatkan perbandingan pada perwujudan tercapainya sasaran pendapatan sehingga terkumpul membentuk SILPA. Sejalan dengan kajian oleh (Rani, 2019) yang menyampaikan pendapatan daerah yang melebihi mempengaruhi peningkatan SILPA. Kemudian dalam penelitian (Yuliana et al., 2022) dinyatakan realisasi PAD berdampak positif dan signifikan pada SILPA.

Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian ini, variabel DAU pada nilai t hitung sebesar -0,589. t hitung -0,589 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,0422 ($0,589 < 2,0422$) dengan nilai signifikansi yaitu 0,560 lebih besar dari 0,05 ($0,560 > 0,05$). Artinya hipotesis kedua (H_2) ditolak yang berarti DAU tidak berpengaruh terhadap SILPA. DAU adalah dana yang sumbernya yaitu penerimaan APBN yang diarahkan dengan maksud menyeimbangkan potensi keuangan setiap daerah guna membiayai keperluan daerah dalam mewujudkan desentralisasi. DAU tidak mempengaruhi terjadinya SILPA, hal ini disebabkan karena serapan DAU di kabupaten/kota kepulauan bangka Belitung terealisasi dengan baik dengan angka yang tidak terlampaui jauh sesuai dengan anggaran yang di rencanakan. Selaras dengan kajian (Elsyayid, 2020) yang menyatakan DAU tidak mempengaruhi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran. Tidak selaras dengan kajian (Dulahi, 2016) yang menyatakan DAU mempengaruhi SILPA.

Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian penelitian ini, variabel DAK nilai t hitung sebesar -0,069. t hitung -0,069 lebih kecil dari nilai t tabel yaitu 2,0422 ($0,069 < 2,0422$) dengan nilai signifikansi yaitu 0,945 melebihi 0,05 ($0,945 > 0,05$). Artinya hipotesis ketiga (H_3) ditolak yang berarti DAK tidak mempengaruhi SILPA. Dilihat dari realisasi penerimaan DAK yaitu terjadi pada tahun 2018- 2019 terjadi penurunan sekitar 44% di kota Pangkal Pinang dan realisasi penerimaan pada dana alokasi khusus yang cukup efektif mencapai pada pencapaian target 100% (95%-99%) yang ditunjukkan selisih realisasi dan anggaran yang nilainya tidak terlampaui jauh. Hal tersebut membuktikan DAK tidak mempengaruhi SILPA dan menunjukkan pemerintah daerah tidak selalu bergantung kepada dana pusat khususnya DAK.

DAK diperuntukkan pemerintah pusat ke daerah dengan tujuan yang ditentukan sebelumnya. Dana ini tidak dapat digunakan untuk keperluan lain, berbeda dengan dana lain seperti DAU yang lebih fleksibel dalam penggunaannya. Sehingga DAK tidak secara langsung berkontribusi pada silpa karena tidak dapat dialokasikan kembali untuk menutupi kekurangan anggaran di sektor lain. Peraturan Menteri Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, dan Pengembalian DAK Tahun Anggaran 2022 nomor 232, menjelaskan bahwa jika terjadi sisa DAK tidak terpakai hingga akhir periode wajib dibalikkan ke kas umum negara maksimal 30 hari setelah periode berakhir. Hal ini menunjukkan bahwa sisa DAK yang tidak terserap tidak akan menambahnya jumlah silpa anggaran. Hal ini sejalan dengan kajian (Agustiani, 2020) yang menyampaikan DAK mempengaruhi SILPA dengan positif.

Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan hasil pengujian penelitian ini, variabel DBH pada nilai t hitung sebesar 2,227. t hitung 2,227 lebih besar dari nilai t tabel yaitu 2,042 ($2,227 > 2,0422$) dengan nilai signifikansi yaitu 0,034 lebih kecil dari 0,05

($0,034 < 0,05$), Artinya hipotesis keempat (H_4) diterima yang berarti DBH berpengaruh dan signifikan terhadap SILPA. Penelitian menghasilkan pernyataan bahwa semakin meningkat DBH maka SILPA mengalami peningkatan. DBH merupakan dana asalnya dari pendapatan APBN yang diarahkan untuk daerah guna membiayai keperluan daerah dalam menyelenggarakan desentralisasi. Hal ini disebabkan karena penerimaan DBH mengalami peningkatan jauh dari target anggaran terutama di DBH sumber daya alam melampaui 100% - 110%, Sehingga pemerintah daerah mengalami ketergantungan terhadap dana pusat dan terjadinya pengalokasian anggaran yang tidak tepat sasaran dan mengalami sisa pada akhir tahun. Hasil kajian fiskal oleh Badan Kebijakan Fiskal (2017) menjelaskan terjadinya SILPA dikarenakan realisasi Dana Perimbangan naik turun, terutama DBH di ujung periode. Hal ini selaras dengan (Agustiani, 2020) menyatakan bahwa ini dikarenakan penumpukan dana yang tidak mampu secepatnya dimanfaatkan langsung di akhir periode sehingga meningkatnya SILPA. Sejalan dengan penelitian (Agustiani, 2020) yang menyatakan bahwa Dana Bagi Hasil berpengaruh terhadap SILPA..

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Berdasarkan hasil uji F maka diperoleh nilai F hitung menunjukkan nilai lebih besar daripada F tabel atau $17,152 > 2,689$ dengan angka signifikasi lebih kecil dibandingkan 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$ jadi hipotesis kelima H_5 diterima. Fenomena ini menunjukkan PAD, DAU, DAK, dan DBH dengan serentak mempengaruhi SILPA dengan signifika. Hasil nilai R Square sebesar 0,696 artinya sebanyak 69,6% variabel independen yaitu PAD, DAU, DAK, dan DBH berkontribusi dalam menjelaskan variabel dependen yaitu SILPA dan tersisa 30,4% yang variabel lain jelaskan. Hasil kajian fiskal oleh Badan Kebijakan Fiskal (2017) menjelaskan dalam penyelenggaraan anggaran, SILPA pada bagian pendapatan muncul karena: a) selau terlampauinya sasaran APBD-P oleh realisasi PAD di antara 101-117%; b) fluktuatifnya realisasi Dana Perimbangan terutama pada DBH akhir periode; dan c) Pendapatan Daerah lainnya relatif melampaui perencanaan, serta terdapat tambahan alokasi transfer Pemerintah pusat atau provinsi spesifik yang tidak diagendakan terlebih dahulu di tengah periode.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian, disimpulkan bahwa PAD dan variable Dana Bagi Hasil secara parsial mempengaruhi SILPA. Variable DAU dan DAK dengan parsial tidak mempengaruhi SILPA. Secara simultan, Variabel PAD, DAU, DAK dan DBH dengan serentak mempengaruhi SILPA. Bagi pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebaiknya berfokus untuk memperhatikan pengguna PAD, DAU, DAK dan DBH dalam pengalokasian anggaran baik belanja maupun pembiayaan dan bagi peneliti Sebaiknya menambah variabel independen lain yang sekiranya mampu mempengaruhi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran dan memperluas objek penelitian serta jangka waktu penelitian guna meningkatkan keterbaruan dan keakuratan hasil penelitian.

REFERENSI

- Agustiani, Eka. 2020. "Determinan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Kabupaten Lombok Utara Tahun 2009-2018." *ELASTISITAS, Jurnal Ekonomi Pembangunan* 2(2).
- Dulahi, Darman. 2016. "Pengaruh Pajak Daerah Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Survey Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Sulawesi Tengah)." : 178–89.
- Fakhirah, Annisah Yuni, Bainil Yulina, and Husni Mubarak. 2022. "Determinasi Belanja Daerah Pada Kabupaten Musi Banyuasin Dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus." 11(1): 1451–60.
- Ghozali, Imam. 2021. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 26*. Edisi 10. Diponegoro: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, Abdul, and Muhammad Iqbal. 2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Pemerintah Pusat. 2019. *Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta.
- Pemerintah Pusat. 2022. *Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara*

Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah. jakarta.

Sugiyono. 2022. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Edisi Kedu. ed. Sutopo. Bandung: Alfabeta.

Trisna, Maria Nona, Henrikus Herdi, M Wihelmina, and Yulia Jaeng. 2023. "Analisis Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sikka." 1(4).

Yuliana, Yuliana, Arliansyah Arliansyah, Murhaban Murhaban, and Zulkifli Zulkifli. 2022. "Pengaruh Realisasi Anggaran Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Pada Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh Periode 2018-2020." *Jurnal Akuntansi Malikussaleh (JAM)* 1(3): 318. doi:10.29103/jam.v1i3.8650.